



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 63 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2014 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4038);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang - Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat belas atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5129);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 96.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (46.108.555.470,31)</u> |

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 49.891.444.529,69

b. Pengeluaran

| | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Semula | Rp - |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp -,-</u> |

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. -

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp. 49.891.444.529,69

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. -

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

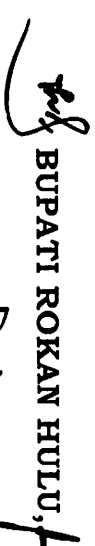
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan nya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal, 17 Safar 1436 H
10 Desember 2014

 BUPATI ROKAN HULU,

H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 17 Safar 1436 H
10 Desember 2014

 SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ROKAN HULU

D A M R I

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2014 NOMOR 65

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
Tahun Anggaran 2014

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah / (Berkurang) | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | | | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | PENDAPATAN | | | | |
| 4. 1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 56,768,018,542.00 | 83,417,412,179.00 | 26,649,393,637.00 | 46.94 |
| 4. 1. 1. | HASIL PAJAK DAERAH | 16,075,000,000.00 | 34,790,000,000.00 | 18,715,000,000.00 | 116.42 |
| 4. 1. 2. | HASIL RETRIBUSI DAERAH | 14,757,124,542.00 | 11,389,300,000.00 | (3,367,824,542.00) | (22.82) |
| 4. 1. 3. | HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | 2,485,894,000.00 | 2,935,076,179.00 | 449,182,179.00 | 18.07 |
| 4. 1. 4. | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | 23,450,000,000.00 | 34,303,036,000.00 | 10,853,036,000.00 | 46.28 |
| 4. 2. | DANA PERIMBANGAN | 1,397,558,203,676.00 | 1,203,228,542,012.00 | (194,329,661,664.00) | (13.90) |
| 4. 2. 1. | BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK | 815,453,673,676.00 | 621,124,012,012.00 | (194,329,661,664.00) | (23.83) |
| 4. 2. 2. | DANA ALOKASI UMUM | 571,522,210,000.00 | 571,522,210,000.00 | 0 | 0 |
| 4. 2. 3. | DANA ALOKASI KHUSUS | 10,582,320,000.00 | 10,582,320,000.00 | 0 | 0 |
| 4. 3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 208,637,709,114.00 | 162,834,765,166.00 | (45,802,943,948.00) | (21.95) |
| 4. 3. 3. | DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA | 97,522,158,114.00 | 77,953,865,166.00 | (19,568,292,948.00) | (20.07) |
| 4. 3. 4. | DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS | 101,736,951,000.00 | 75,502,300,000.00 | (26,234,651,000.00) | (25.79) |
| 4. 3. 5. | BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA | 9,378,600,000.00 | 9,378,600,000.00 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 1,662,963,931,332.00 | 1,449,480,719,357.00 | (213,483,211,975.00) | (14.73) |
| 5. | BELANJA | | | | |
| 5. 1. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 735,979,692,170.00 | 713,937,825,094.69 | (22,041,867,075.31) | (2.99) |
| 5. 1. 1. | BELANJA PEGAWAI | 574,897,100,822.00 | 552,769,404,746.69 | (22,127,696,075.31) | (3.85) |
| 5. 1. 4. | BELANJA HIBAH | 72,841,769,142.00 | 76,197,069,142.00 | 3,355,300,000.00 | 4.61 |
| 5. 1. 5. | BELANJA BANTUAN SOSIAL | 12,238,870,000.00 | 9,443,970,000.00 | (2,794,900,000.00) | (22.84) |
| 5. 1. 6. | BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | 4,867,927,271.00 | 4,867,927,271.00 | 0 | 0 |
| 5. 1. 7. | BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK | 57,505,750,000.00 | 57,591,579,000.00 | 85,829,000.00 | 0.15 |
| 5. 1. 8. | BELANJA TIDAK TERDUGA | 13,628,274,935.00 | 13,067,874,935.00 | (560,400,000.00) | (4.11) |
| 5. 2. | BELANJA LANGSUNG | 1,022,984,239,162.00 | 785,434,338,792.00 | (237,549,900,370.00) | (23.22) |
| 5. 2. 1. | BELANJA PEGAWAI | 99,266,789,300.00 | 91,867,047,400.00 | (7,399,741,900.00) | (7.45) |
| 5. 2. 2. | BELANJA BARANG DAN JASA | 394,958,859,463.00 | 339,081,184,977.00 | (55,877,674,486.00) | (14.15) |
| 5. 2. 3. | BELANJA MODAL | 528,758,590,399.00 | 354,486,106,415.00 | (174,272,483,984.00) | (32.96) |
| Jumlah | | 1,758,963,931,332.00 | 1,499,372,163,886.69 | (259,591,767,445.31) | (17.31) |
| Surplus / (Defisit) | | (96,000,000,000.00) | (49,891,444,529.69) | 46,108,555,470.31 | 0 |
| 6. | PEMBIAYAAN | | | | |
| 6. 1. | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 96,000,000,000.00 | 49,891,444,529.69 | (46,108,555,470.31) | (48.03) |
| 6. 1. 7. | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU | 96,000,000,000.00 | 49,891,444,529.69 | (46,108,555,470.31) | (48.03) |
| Jumlah | | 96,000,000,000.00 | 49,891,444,529.69 | (46,108,555,470.31) | (48.03) |
| Pembiayaan neto | | 96,000,000,000.00 | 49,891,444,529.69 | (46,108,555,470.31) | (48.03) |
| Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA/SIKPA) | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pasir Pengaraian, 10 Desember 2014

Bupati ROKAN HULU



(H. ACHMAD)

| Kode Rekening | Uraian Rekening | Jumlah (Rp) | | Bertambah / (Berkurang) | |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | JUMLAH | 20,019,119,950.00 | 14,718,181,565.00 | (5,300,938,385.00) | (26.48) |

 Pasir Pengaraian, 10 Desember 2014
 Bupati ROKAN HULU

 (H. ACHMAD)



| NO. | NAMA PENERIMA | ALAMAT PENERIMA | APBD | PAPBD | BERKURANG/BERTAMBAH |
|-----|---|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 173 | Jaring Insang | Kec. Rokan IV Koto | 10,240,000.00 | 10,240,000.00 | - |
| 174 | Kecamatan Tambusai Utara | Kec. Tambusai Utara | | - | - |
| 175 | Jaring Penggilar | Kec.Tambusai Utara | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | - |
| 176 | Jaring Insang | Kec.Tambusai Utara | 10,240,000.00 | 10,240,000.00 | - |
| 177 | Mata Pancing | Kec.Tambusai Utara | 720,000.00 | 720,000.00 | - |
| 178 | Bantuan Ternak Sapi Kelompok Surga Jaya Surau Gading Desa Rambah Samo Kec. Rambah Samo | Kec. Rambah Samo | 93,500,000.00 | | (93,500,000.00) |
| 179 | Bantuan Ternak Sapi Kelompok Maju Bersama Surau Gading Desa Rambah Samo Kec. Rambah Samo | Kec. Rambah Samo | 93,500,000.00 | | (93,500,000.00) |
| 180 | Bantuan Ternak Sapi Kelompok Sejahtera Surau Gading Desa Rambah Samo Kec. Rambah Samo | Kec. Rambah Samo | 93,500,000.00 | | (93,500,000.00) |
| 181 | Pakan Ternak Untuk Kelompok Tani Kec. Bangun Purba | | - | | - |

 Pasir Pengaraian, 10 Desember 2014
BUPATI ROKAN HULU

 (H. ACHMAD)

Lampiran IV : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN APBD
Nomor : 63 Tahun 2014
Tanggal : 10 Desember 2014

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA**

| NO | NAMA PENERIMA | APBD | PAPBD | BERTAMBAH/BERKURANG |
|----|---|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Siswa dari Keluarga Tidak Mampu | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | - |
| 2 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Mahasiswa Untuk Penyusunan Tugas Akhir | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | - |
| 3 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Mahasiswa Untuk Biaya Pendidikan | 9,718,870,000.00 | 6,923,970,000.00 | (2,794,900,000.00) |
| 4 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Kaum Duafa | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | - |
| 5 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Untuk Modal Kepada Keluarga Miskin | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | - |
| 6 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga Korban Musibah | 375,000,000.00 | 375,000,000.00 | - |
| 7 | Belanja Bantuan Santunan Kepada Veteran/Pejuang Kemerdekaan Kab. Rokan Hulu | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - |
| 8 | Belanja Bantuan Santunan Kepada Keluarga yang Mengurus Akta Kematian | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | - |
| 9 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Ahli Urat Tuna Netra Ulong Awak | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - |
| | TOTAL | 12,238,870,000.00 | 9,443,970,000.00 | (2,794,900,000.00) |

 Pasir Pengaraian, 10 Desember 2014
BUPATI ROKAN HULU

(Drs. H. ACHMAD, M.Si)